

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tersedianya infrastruktur yang memadai. Tidak ada yang memungkiri pentingnya peranan infrastruktur dalam aktivitas ekonomi suatu daerah. Beberapa fakta empiris menyatakan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur suatu daerah akan berjalan seiring dengan pertumbuhan *output* ekonomi daerah tersebut. Oleh karena itu, tiap daerah saat ini seolah-olah berlomba untuk meningkatkan pembangunan daerahnya.

Untuk memperoleh suatu infrastruktur, pemerintah daerah terlebih dahulu menganggarkannya kedalam kelompok belanja modal. Proses penganggaran belanja modal tidak hanya melibatkan negoisasi di antar pihak eksekutif, tetapi juga bergantung pada masukan dan saran dari insinyur, arsitek, dan perencana. Selain itu, dalam penganggaran belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama dalam pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut.

Penentuan proses alokasi mengacu pada laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan sedikit peningkatan pada jumlah anggaran tanpa merubah jenis atau pos belanja. Pendekatan sistem anggaran disebut dengan anggaran berimbang dan dinamis *line-item and Incremental budgeting*.

Menurut Indra Bastian:

***Line-item* anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan), sedangkan *Incremental budgeting* anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang.¹**

Setelah otonomi daerah, pemerintah melaksanakan perombakan pada proses penganggaran. Pendekatan anggaran yang digunakan bukan lagi pendekatan *line-item and Incremental budgeting* tetapi pendekatan anggaran berbasis kinerja *Performance-based budgeting*.

Menurut Indra Bastian:

***Performance-based budgeting* yaitu sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. Teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan biaya unit (*unit cost*) dari setiap kegiatan yang terstruktur.²**

Menurut Mahmudi:

Bahwa Penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) membutuhkan serangkaian indikator kinerja dan target kinerja. Indikator kinerja tersebut meliputi indikator *input* (masukan), *output* (keluaran), dan *outcome* (hasil). Salah satu indikator input yang perlu diukur adalah biaya atau anggaran. Untuk itu target biaya atau anggaran masing-masing kegiatan, program, dan organisasi sangat penting untuk nantinya digunakan sebagai tolok ukur kinerja kegiatan, program, dan organisasi.³

Pengalokasian anggaran dalam kelompok belanja modal dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana umum yang diberikan secara gratis oleh pemerintah daerah. Namun, karena adanya

¹ Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar**, Edisi Ketiga, Erlangga, Jakarta, 2010, hal.202,204

² Indra Bastian, Loc. Cit.,hal. 202

³Mahmudi, **Manajemen Keuangan Daerah**, Erlangga, Jakarta, 2009, hal.87

kepentingan politik dari lembaga legislative yang terlibat dalam penyusunan anggaran, yang berakibatkan terdistorsinya alokasi belanja modal sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan dimasyarakat. Sering kali didalam daerah menunjukkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak terpenuhi.

Menurut Mahmudi:

Dalam pengelolaan keuangan daerah, anggaran daerah dan setiap biaya merupakan belanja, tetapi tidak semua belanja merupakan biaya, karena bisa jadi merupakan belanja modal yang masih berupa *cost* dan *expenditure*.⁴

Harus dilandaskan pada peraturan resmi pemerintah yang biasa disebut peraturan daerah. Peraturan ini merupakan acuan bagi pengelola keuangan daerah untuk menentukan apakah pengeluaran dana atau kas untuk mengeluarkan biaya-biaya, baik berupa aset tetap (belanja modal) dan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aset tetap tersebut boleh dilakukan.

Menurut Erlina. et all.,:

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, bangunan, peralatan serta aset tak berwujud.⁵

Dalam konsep *multi-term expenditure framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang. Berarti bila suatu daerah

⁴.Mahmudi, Loc.Cit.,hal.87

⁵ Erlina. et all..**Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua**l, Salemba Empat, Jakarta, 2015, hal.155

berencana untuk menganggarkan belanja modal pada anggaran belanja pemerintah tersebut harus punya komitmen untuk menyediakan dana untuk pemeliharaan dan rehabilitasi atas aset tetap yang diperolehnya dari belanja modal tersebut.

Secara teoritis belanja modal dan belanja pemeliharaan memiliki hubungan erat. Bagaimanapun belanja pemeliharaan hanya akan muncul bila ada “sesuatu” yang harus dipelihara dan “sesuatu” itu adalah aset tetap. Aset tetap ini biasanya muncul sebagai hasil dari terealisasinya belanja modal pada anggaran belanja pemerintah. Namun demikian, tidak semua aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah berasal dari realisasi APBN/APBD.

Aset tetap dapat diperoleh dari dua sumber yaitu APBN/APBD dan dari luar pelaksanaan APBN/APBD. Aset tetap yang diperoleh dari luar APBN/APBD berasal dari pemberian pihak lain seperti lembaga donor dan masyarakat. Tanah mungkin dihadiahkan kepada pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*). Perolehan aset tetap dengan cara itu tentu tidak akan membebani APBN/APBD pada kelompok belanja modal. Namun disisi lain, beban anggaran pada kelompok belanja pemeliharaan tetap akan terbebani.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, disetujui secara bersama oleh pemerintah daerah yang ditetapkan pada peraturan daerah. Diharapkan dengan adanya anggaran berguna mendapatkan aset tetap dan pendanaan untuk memperoleh aset, maka pelaksanaan dalam berbagai aktivitas melayani kepentingan publik dapat lebih lancar dan terarah.

**Tabel 1.1 Total Anggaran Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Periode
2014 – 2018**

Tahun Anggaran	Belanja Modal	Belanja Pemeliharaan
2014	196.251.290.489	26.003.844.989,99
2015	220.957.730.202	23.013.371.050
2016	304.988.830.855	30.283.232.880
2017	251.776.257.868	29.913.482.300
2018	387.786.197.704	27.132.920.109

Sumber : Anggaran Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai periode 2014-2018

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tren belanja modal mulai dari tahun 2014–2018 mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar Rp. 251.776.257.868. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 tidak semua difokuskan kepada belanja modal melainkan adanya belanja infrastruktur karena berfokus untuk melakukan pembangunan dan menggali potensi – potensi yang ada dengan tujuan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat. Namun dalam hal ini ada kalanya diatur oleh BAPPEDA dengan adanya indikator ataupun indeks-indeks yang mengatur seberapa besar anggaran belanja modal dapat digunakan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa belanja pemeliharaan pada tahun 2015 mengalami penurunan Rp. 23.013.371.050 terjadi peningkatan pada tahun 2016 Rp. 30.283.232.880 dan pada tahun 207 – 2018 mengalami penurunan yaitu 2017 sebesar Rp. 29.913.482.300 dan 2018 sebesar Rp. 27.132.920.109.

Hal ini menarik perhatian penulis untuk menguji hubungan antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data anggaran belanja modal mulai tahun anggaran 2014 sampai

2018 dan belanja pemeliharaan mulai tahun anggaran 2014 sampai 2018 pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul **“ANALISIS HUBUNGAN BELANJA MODAL DENGAN BELANJA PEMELIHARAAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah yang akan di kemukakan pada penelitian ini adalah “apakah belanja modal pada tahun sebelumnya (2017) mempunyai hubungan dengan belanja pemeliharaan tahun berikutnya (2018) pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang hubungan belanja modal dengan belanja pemeliharaan pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan Belanja Modal dengan Belanja Pemeliharaan yang diteliti pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Bagi Pemerintahan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bermanfaat untuk Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan menjadi masukan mengenai keterkaitan antara Belanja Modal dengan Belanja Pemeliharaan.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berhubungan dengan masalah ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset Syaiful (2010). Aset tetap yang diperoleh sebagai hasil terealisasinya belanja modal tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.

Menurut Abdul Halim **“Bahwa Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.”**⁶

Fitriyati (2012) belanja modal dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:

1. Belanja Publik yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. misalnya, gedung dan bangunan, pembangunan jalan raya, pembelian alat transportasi.

⁶Abdul Halim, **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama: Salemba Empat: Jakarta,2007, hal.101.

2. Belanja Aparatur

Belanja aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak dapat langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat periode berjalan dan periode yang akan datang. misalnya, pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintah.

Menurut Komite Standart Akuntansi Pemerintah :

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan asetlainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.⁷

Menurut Erlina. et all.,:

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai mafaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetapberwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangunan aset.⁸

Adapun belanja modal terdiri atas tanah, jalan dan jembatan, bangunan air (irigasi), instansi, jaringan, bangunan gedung, alat-alat besar, alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan alat-alat komunikasi, alat-alat kedokteran, alat laboratorium, barang bercorak kesenian, kebudayaan, hewan, ternak serta tanaman dan belanja modal alat-alat persenjataan/ keamanan.

⁷Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta, 2005, hal. PSAP 02-7.

⁸Erlina. et all..Op.Cit.,hal.158

2.2 Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan adalah belanja yang dialokasikan untuk menjaga agar aset tetap senantiasa dalam kondisi siap pakai sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya. Dalam perspektif akuntansi, anggaran untuk pemeliharaan dihitung berdasarkan lamanya waktu atau periode pemakaian aset tetap, seperti halnya dalam perhitungan biaya depresiasi aset tetap. Artinya, jika suatu aset tetap diperoleh pada awal tahun, maka biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk satu tahun, jika aset tetap diperoleh pada pertengahan tahun, maka alokasi biaya pemeliharaan juga dialokasikan untuk setengah tahun atau satu semester.

Belanja Pemeliharaan adalah belanja yang bersifat rutin yang terdapat pada semua satuan kerja, sehingga penentuan besarnya anggaran belanja pemeliharaan setiap tahunnya tergantung pada banyaknya aset yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja yang bersangkutan Sri Hayati (2009). Meskipun demikian, pada kenyataannya dilapangan pemerintah daerah tidak selalu mengalokasikan belanja pemeliharaan berdasarkan aset tetap yang dimilikinya. Hal ini terlihat ketika dalam proses penyusunan APBD, banyak pemerintah daerah yang tidak melihat besaran nilai aset tetapnya sebagai dasar penentuan belanja pemeliharaan mereka. Bahkan ada beberapa pemerintah daerah yang belum mempunyai neraca awal sebagai dasar pengalokasian belanja pemeliharaan.

Belanja pemeliharaan adalah kewajiban yang muncul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada agar tetap dalam

kondisi yang normal tanpa memperhatikan besar atau kecil aset tersebut Syaiful (2010).

Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain, pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin dan lain – lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan (Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008).

Belanja pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar member manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi ke dalam modal dan masuk kedalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap dan diberikan penjelasan didalam catatan atas laporan keuangan Syaiful (2010).

1.3 Klasifikasi Belanja

2.3.1 Klasifikasi Belanja Modal

Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama Syaiful (2010) :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematang tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan dan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan

manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

2.3.2 Klasifikasi Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik. Objek belanja dari jenis barang belanja pemeliharaan untuk bagian belanja aparatur daerah terdiri atas :

- 1) Biaya pemeliharaan bangunan gedung,
- 2) Biaya pemeliharaan alat-alat angkutan,
- 3) Biaya pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga,
- 4) Biaya pemeliharaan alat-alat studio dan alat komunikasi,
- 5) Biaya pemeliharaan perpustakaan,
- 6) Biaya pemeliharaan alat-alat persenjataan,

Objek belanja untuk jenis pemeliharaan untuk bagian belanja pelayanan publik terdiri atas :

- a) Biaya pemeliharaan jalana dan jembatan,
- b) Biaya pemeliharaan bangunan air (irigasi),
- c) Biaya pemeliharaan instalasi,
- d) Biaya pemeliharaan jaringan,
- e) Biaya pemeliharaan bangunan gedung,
- f) Biaya pemeliharaan monumen,
- g) Biaya pemeliharaan alat-alat besar,
- h) Biaya pemeliharaan alat-alat angkutan,
- i) Biaya pemeliharaan alat-alat besar,
- j) Biaya pemeliharaan alat-alat bengkel,
- k) Biaya pemeliharaan alat-alat pertanian,
- l) Biaya pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga,
- m) Biaya pemeliharaan alat-alat studio, dan alat komunikasi,
- n) Biaya pemeliharaan alat-alat kedokteran,
- o) Biaya pemeliharaan alat-alat laboratorium,
- p) Biaya pemeliharaan buku perpustakaan,
- q) Biaya pemeliharaan alat-alat laboratorium,
- r) Biaya pemeliharaan buku perpustakaan,
- s) Biaya pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan,
- t) Biaya pemeliharaan hewan, ternak, serta tanaman
- u) Biaya pemeliharaan buku persenjataan,

2.3.3 Klasifikasi Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Jenis belanja barang dan jasa untuk bagian belanja aparatur daerah terdiri atas objek belanja tersebut:

- 1) Biaya bahan habis pakai,
- 2) Biaya jasa kantor,
- 3) Biaya cetak dan penggandaan keperluan kantor,
- 4) Biaya sewa kantor,
- 5) Biaya makanan dan minuman kantor,
- 6) Biaya pakaian dinas,
- 7) Biaya bunga utang,
- 8) Biaya depresiasi gedung (operasional),
- 9) Biaya depresiasi alat angkutan (operasional),
- 10) Biaya depresiasi alat kantor dan rumah tangga,
- 11) Biaya depresiasi alat studio dan alat komunikasi (operasional),

Jenis belanja ini untuk bagian belanja pelayanan terdiri atas objek belanja berikut ini:

- 1) Biaya bahan pakai habis kantor,
- 2) Biaya jasa kantor,
- 3) Biaya cetak dan penggandaan keperluan kantor,
- 4) Biaya sewa kantor,

- 5) Biaya makanan dan minuman kantor,
- 6) Biaya bunga utang,
- 7) Biaya depresiasi gedung (operasional),
- 8) Biaya alat-alat besar (operasional),
- 9) Biaya depresiasi alat-alat kantor dan rumah tangga,
- 10) Biaya depresiasi alat-alat angkutan (operasional),

2.4 Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan dalam Anggaran Daerah

Aset tetap yang dimiliki merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap yang dimiliki, maka pemerintah daerah memberikan berupa dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik dalam kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai pada setiap tahunnya diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Maksud dari belanja modal ini untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah baik dalam bentuk peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap yaitu dengan cara membangun sendiri, menukarkan atau membeli dengan aset tetap lainnya. Selain itu, aset tetap dapat juga berasal dari pihak lain berupa hibah atau bantuan. Khususnya di dalam lingkungan pemerintah cara yang biasa dilakukan yaitu

dengan membeli. Selain itu, dana untuk belanja modal harus memperhatikan aspek kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk waktu jangka panjang terutama pada pemeliharaan aset tetap yang diperoleh dari belanja modal.

Pengeluaran untuk belanja modal harus mendapat perhatian yang lebih besar dari pada pengeluaran rutin. Karna disebabkan adanya pengeluaran investasi/modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek. Sehingga akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam melakukan pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada anggaran tahun-tahun berikutnya pada Pemerintah kabupaten Serdang Bedagai. Sehingga memberikan dampak yang sangat besar bagi pemerintah itu sendiri.

Menurut Abdul Halim:

Namun Adapun belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan, belanja mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan dan jembatan, belanja irigasi, belanja jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya⁹.

Munculnya aset tetap sebagai hasil dari terealisasi dari anggaran belanja modal yang konsekuensinya munculnya belanja pemeliharaan pada masa yang akan datang. Namun demikian, perlu diperhatikan karena adanya beberapa belanja modal Syaiful (2010), yaitu :

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki.

⁹Abdul Halim, **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Ke-Empat, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hal.107

- b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapasitas aset tetap/aset lainnya.

Menurut Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang sesuai dengan bagan akun standar, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas. Dengan demikian menambah aset pemerintah.
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batas minimum kapasitas aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual dan dapat digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari.

Dengan dilakukannya alokasi belanja modal yang didasarkan dengan kebutuhan yang artinya bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi dipemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan pengadaan aset tetap. Sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing satuan kerja, satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa, penyediaan sarana dan prasarana fisik, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan raya dan jembatan, sementara dalam satuan kerja lainnya hanya memberikan pelayanan jasa langsung dapat berupa pelayanan administrasi, pengamanan, pemberdayaan, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan.

Belanja pemeliharaan yang terjadi pada semua satuan kerja karena semua memiliki aset tetap. Karena, bersifat rutin dan belanja pemeliharaan tidak tergantung pada Tugas pokok dan fungsi satuan kerja, tetapi pada jumlah aset yang dimiliki. Maka biaya pemeliharaan bukan merupakan biaya aktivitas yang terjadi yang bersifat variabel.

Kesimpulan beberapa perbedaan dari belanja modal dan belanja pemeliharaan yaitu, belanja pemeliharaan bersifat rutin dan tidak tergantung pada tugas dan fungsi pada satuan kerja unit organisasi, sehingga dapat terjadi pada semua unit organisasi pemerintahan daerah dikarenakan semuanya memiliki aset tetap, Menurut Amran Manurung dan Halomoan Sihombing **“Belanja modal juga tidak bersifat rutin. Belanja modal ini akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset daerah.”**¹⁰

2.5 Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Konsep *multi-tern expenditure framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang. Hal ini berarti suatu daerah berencana untuk menganggarkan belanja modal pada anggaran belanjannya, pemerintah tersebut

¹⁰Amran Manurungdan Halomoan Sihombing, **Analisis Laporan Keuangan: Sektor Swasta dan Pemerintahan Daerah**, 2018, hal. 246

harus memiliki komitmen untuk menyediakan dana untuk pemeliharaan dan rehabilitasi atas aset tetap yang diperolehnya dari belanja modal tersebut.

Di dalam perspektif manajemen keuangan dan akuntansi, diperhitungkan *cost* untuk penggunaan aset dalam operasional organisasi dalam bentuk depresiasi dan harus diperhitungkan *cost* untuk pemeliharaan aset sehingga dapat dimanfaatkan dengan efektif sesuai dengan kegunaannya. Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan secara rutin atau yang terjadi berulang-ulang tiap tahun (*recurrent*) atas aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Infrastruktur adalah aset yang diperoleh dari pengeluaran modal yang dimiliki dan memiliki masa manfaat yang panjang. Aspek “masa manfaat yang panjang” membantu menjelaskan mengapa pemerintah perlu menghubungkan antara pengeluaran modal dan pengeluaran operasional. Belanja modal menyebabkan diperolehnya aset tetap (*fixed asset*) pada saat belanja sepenuhnya direalisasi atau *output*-nya sudah diperoleh. Meskipun belanja modal dan belanja pemeliharaan dianggarkan dengan cara terpisah, bukan berarti belanja modal diproses tanpa melihat pengaruh terhadap penganggaran operasional.

Belanja modal tidak hanya berkaitan dengan perolehan aset fisik yang masa manfaatnya lebih dari satu, tetapi mencakup modal untuk pemeliharaan dan rehabilitasinya. Proposal investasi harus dinilai baik dari segi modal dan biaya operasional. Pada saat membeli item, pemerintah harus lebih mempertimbangkan dan tidak hanya dari segi harga awalnya, tetapi biaya yang berhubungan dengan pemeliharaan item tersebut.

Menurut beberapa peneliti menyatakan bahwa pengalokasian belanja modal tidak selalu terpisah dengan pengalokasian belanja operasional. Pagano (1984) dikutip dari Baihaqi Husnul Khotimah (2009) berpandangan perlunya menghubungkan diantara keduanya, Menyatakan:

Over time, crosswalking of capital budget expenses to operating expenses has eroded, in part due to the separateness of the deliberations of those budget. State and local governments usually schedule separate budget hearings for the operating budget and for the capital budget...decisions for each set of outlays, then, are made separately.

Thomassen (1990) dikutip dari Baihaqi Husnul Khotimah (2009) memberikan catatan penting bagi penganggaran belanja modal. Ia menyatakan bahwa paling tidak setengah dari *state* yang melaporkan item belanja modal dan non belanja modal secara terpisah gagal menggabungkan anggarannya untuk melakukan evaluasi secara simultan dan komparatif untuk kedua item belanja tersebut. National League of Cities menyatakan bahwa sebanyak 57% kota di Amerika Serikat

Kamensky (1984) dikutip dari Abdullah dan Halim (2006) yang melakukan penelitian atas kota-kota yang menjadi anggota *National League of Cities* menemukan bahwa sebanyak 57% kota di Amerika Serikat tidak mempertimbangkan biaya pemeliharaan dan perbaikan terhadap *expected life* dari suatu *project*. Menurut manajer publik perlu memahami lebih jauh biaya total dari belanja modal, bukan hanya pengeluaran lebih jauh biaya total dari belanja modal, bukan hanya pengeluaran untuk konstruksi dan pengadaan.

Keputusan dalam meningkatkan belanja modal merupakan bagian dari keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, yang

diikuti dengan peningkatan belanja-belanja yang lain, seperti belanja pemeliharaan. Namun, bukan berarti belanja modal selalu menjadi penyebab atau *predictor* bagi kenaikan belanja modal pemeliharaan. Beberapa argumen yang menyatakan perlunya kehati-hatian dalam melihat hubungan belanja modal dan belanjaoperasional dan pemeliharaan diuraikan berikut ini (Bland dan Nunn, 1992).

Pertama, Pengaruh belanja modal terhadap belanja pemeliharaan tidak seragam karena tergantung apakah belanja modal tersebut merupakan kebijakan menggantikan tenaga manusia (*labor*) dengan mesin (*capital*) atau semata-mata untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pemerintah melalui pembangunan fasilitas yang baru.

Kedua, pengaruhnya bervariasi diantara berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah tergantung pada sifat pelayanan tersebut, apakah padat modal atau padat karya.

Ketiga, Adanya kesenjangan waktu (*lag of time*) antara realisasi belanja modal dan pengaruhnya yang terasa dalam kenaikan atau perubahan dalam belanja pemeliharaan yang berbeda diantara berbagai bentuk pelayanan.

Keempat, hubungan investasi modal kemungkinan ditutupi oleh kehadiran *budgetslack* (*excess resources*) atas pelayanan publik, khususnya jika *slack* tersebut digunakan untuk meningkatkan biaya yang muncul dari peningkatan modal.

Kelima, mengukur *magnitude* dan *timing* belanja modal merupakan pekerjaan yang rumit karena tidak lengkapnya data dan tidak terhitungnya kontribusi pihak swasta dalam pengadaan infrastruktur pemerintah daerah.

2.6 Pengeluaran Modal dan Pengeluaran Pendapatan

2.6.1 Pengeluaran Modal (*Capital Expenditure*)

Pengeluaran modal (*capital expenditure*) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aktiva tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktiva tetap. Biaya-biaya ini biasanya dikeluarkan dalam jumlah yang cukup besar (material), namun tidak sering terjadi.

Contoh dari pengeluaran modal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli tambahan komponen aktiva tetap dan atau untuk mengganti komponen aktiva tetap yang ada, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, kapasitas, dan atau memperpanjang masa manfaat dari aktiva tetap terkait. Dengan kata lain pengeluaran modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak dibebankan langsung sebagai beban dalam laporan laba rugi, melainkan dikapitalisasi terlebih dahulu sebagai aktiva tetap di neraca, karena pengeluaran-pengeluaran ini akan memberikan manfaat bagi perusahaan di masa mendatang. pengeluaran-pengeluaran dalam kategori ini akan dicatat dengan cara mendebet akun aktiva tetap terkait.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) adalah biaya-biaya yang hanya akan memberi manfaat dalam

periode berjalan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan ini tidak akan dikapitalisasi sebagai aktiva tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan di mana biaya tersebut terjadi (dikeluarkan). Contoh dari pengeluaran ini adalah beban untuk pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap.

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk mempertahankan aktiva tetap agar selalu berada dalam kondisi operasional yang baik dikenai sebagai beban pemeliharaan, contohnya adalah pengeluaran untuk pengecatan dinding bangunan, penggantian pelumas mesin dan sebagainya. Pengeluaran untuk beban pemeliharaan ini adalah hal yang biasa, terjadi berulang biasanya dalam jumlah yang kecil (tidak material), dan tidak akan meningkatkan efisiensi, kapasitas, atau memperpanjang masa manfaat dari aktiva tetap terkait, oleh karena itu akan segera dicatat sebagai beban ketika terjadi. Sedangkan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk mengembalikan aktiva tetap ke kondisi operasional yang baik setelah adanya kerusakan dan atau untuk mengganti komponen aktiva tetap yang rusak, dikenal sebagai beban perbaikan.

Pada dasarnya, biaya-biaya yang dikeluarkan atas aktiva tetap dapat diklasifikasikan menjadi empat tahap, yaitu tahap pendahuluan sebelum perolehan-perolehan atau konstruksi, dan pemakaian.

Tahap pendahuluan terjadi sebelum pihak perusahaan yakin atas kemungkinan dilakukannya pembelian aktiva tetap. Selama tahap ini, perusahaan biasanya akan melakukan studi kelayakan dan analisis keuangan

untuk menentukan kemungkinan diperolehnya aktiva tetap. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam tahap pendahuluan ini tidaklah dapat dikaitkan dengan aktiva tetap tertentu, sehingga harus diperlakukan sebagai pengeluaran pendapatan.

Pada tahap pra-perolehan keputusan untuk membeli aktiva tetap telah menjadi mungkin, namun belum terjadi. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam tahap ini, seperti biaya survei, sudah dapat dikaitkan dengan aktiva tetap tertentu yang akan dibeli sehingga harus diperlakukan sebagai pengeluaran modal.

Dalam tahap perolehan atau konstruksi, pembelian aktiva tetap terjadi atau konstruksetelah dimulai, namun aktiva tetap tersebut belum siap untuk digunakan. Biaya-biaya yang terkait langsung dengan aktiva tetap yang dibeli ini harus dikapitalisasi dalam akun aktiva tetap tersebut. Contohnya adalah harga beli mesin, pajak, ongkos angkut, biaya asuransi selama dalam perjalanan, ongkos pemasangan dan biaya uji coba sampai mesin tersebut benar-benar dapat dioperasikan akan dicatat dalam akun mesin. Demikian juga, untuk bangunan yang dibangun sendiri, biaya-biaya yang terkait langsung dengan pembangunan gedung baru tersebut akan dikapitalisasi sebagai akun pekerjaan dalam penyelesaian (*construction in progress*). Ketika bangunan tersebut telah selesai dibangun dan siap untuk dimanfaatkan, maka biaya yang telah dikapitalisasi sebagai akun pekerjaan dalam penyelesaian akan ditransfer ke dalam akun aktiva tetap terkait, yaitu akun bangunan. Contohnya adalah biaya arsitek, biaya untuk membeli bahan-bahan bangunan, biaya upah pekerja,

biaya sewa peralatan untuk membangun, bahkan termasuk bunga atas dana yang dipinjam untuk membiayai pembangunan gedung baru tersebut.

Dalam tahap pemakaian, aktiva tetap telah siap digunakan. sepanjang tahap ini, aktiva tetap seharusnya disusutkan. Selama tahap ini, segala aktivitas perbaikan dan pemeliharaan atas aktiva tetap yang sifatnya normal serta berulang harus dicatat langsung ke dalam akun beban untuk periode bersangkutan, Sedangkan biaya yang terjadi untuk memperoleh tambahan komponen aktiva tetap atau mengganti komponen yang sudah ada haruslah dikapitalisasi, sepanjang biaya-biaya ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aktiva tetap atau memperpanjang masa manfaat aktiva tetap bersangkutan.

2.6.2 Pengeluaran pendapatan (*Revenue Expenditure*)

Pengeluaran pendapatan (*Revenue Expenditure*) adalah pengeluaran / biaya-biaya yang hanya memberikan manfaat ekonomis pada saat periode berjalan terjadinya pengeluaran. Pengeluaran ini tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap pada neraca tetapi langsung dibebankan pada laporan laba/ rugi periode berjalan.

Dilihat dari materialistisnya, pengeluaran pendapatan ini nilai cenderung kecil, alias cenderung kecil bagi perusahaan. Manfaat ekonomisnya yang diperoleh tidak lebih dari satu tahun buku. Pengeluaran ini sering terjadi dalam operasional perusahaan dan berulang-ulang. Contohnya seperti pengeluaran pemeliharaan mesin, pembersihan mesin.

Pengeluaran-pengeluaran seperti ini biasanya tidak membuat umur ekonomis mesin bertambah, juga tidak bisa meningkatkan kapasitas produksi mesin maupun tingkat efisiensinya. Dan nominal yang dikeluarkan cenderung tidak material dibanding perolehan mesin itu sendiri. Pengeluaran seperti itu berulang-ulang terjadi dan pencatatannya langsung dibebankan pada periode tersebut.

2.7 Peneliti Terdahulu

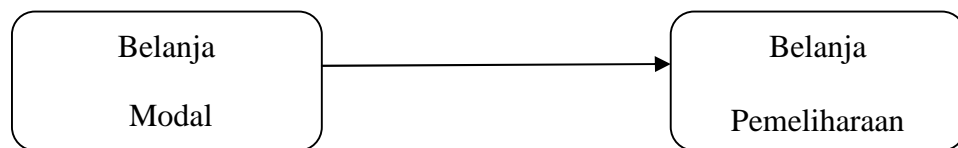
Adapun yang menjadi referensi penulis yang berkaitan dengan judul penulis oleh karena itu penulis menggunakan penelitian perdahulu sebagai pedoman ataupun menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Variabel	Hasil
1.	Fitriyati	Analisis Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan pada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah	1.Korelasi Pearson Prodac Moment 2.Uji Signifikansi Korelasi 3.Koefisien Determinasi	1.Variabel Independen: Belanja Modal 2.Variabel Dependen: Belanja Pemeliharaan	Terdapat Hubungan yang kuat dan positif anatar belanja modal tahun anggaran 2009 dan belanja pemeliharaan tahun anggaran berikutnya 2010.

2.	Sri Hayati Br.Sembiring	Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemeliharaan dalam Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Utara	1.Uji Normalitas 2.Uji MultikoLinearitas 3.Uji Heteroskedatisitas 4.Uji Autokorelasi	1. Variabel Independen: Belanja Modal (X1)dan Pendapatan Asli Daerah (X2) 2. Variabel Dependen: Belanja Pemeliharaan (Y)	1. Belanja Modal dan PAD secara simultan berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan 2. Belanja Modal dan PAD secara Parsial mempengaruhi Belanja Pemeliharaan
3.	Syukriyah dan Abdul Halim	Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan	Model Regresi	1.Variabel Independen: Belanja Modal 2.Variabel Dependen: Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal berasosiasi positif

2.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1: kerangka pemikiran

Penjelasan :

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dibangun untuk mengetahui hubungan anatar belanja modal dan belanja pemeliharaan dimana ada indikasi bahwa jumlah dana yang dianggarkan pada belanja modal akan secara langsung mempengaruhi jumlah anggaran untuk belanja pemeliharaan. Belanja modal adalah belanja yang dianggarkan untuk mendapatkan aset tetap pada tahun berjalan. Belanja ini mungkin baru akan terealisasi pada pertengahan atau pada akhir periode tahun berjalan. Jadi, aset tetap baru akan ada pada periode berjalan.

Belanja Pemeliharaan adalah belanja yang dianggarkan untuk memelihara aset tetap yang diperoleh dari terealisasinya belanja modal pada pada tahun sebelumnya. Jadi, pada penelitian ini data yang akan digunakan yaitu data belanja modal tahun anggaran sebelumnya (2017) dan data anggaran belanja pemeliharaan pada anggaran sebelumnya (2018). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian kausal yang menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya

2.9 Hipotesis Penelitian

Belanja modal adalah belanja yang dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk menambah aset tetapnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah daerah, serta peningkatan pelayanan publik. Agar aset tetap yang diperoleh dari terealisasinya belanja modal tersebut tetap dalam kondisi yang normal dan siap digunakan, diperlukan belanja pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset tetap tersebut. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Hal ini berarti bila suatu daerah berencana untuk menganggarkan belanja modal pada anggaran belanjanya, pemerintah tersebut juga harus punya komitmen untuk menyediakan dana untuk pemeliharaan dan rehabilitasi atas aset tetap yang diperolehnya dari belanja modal tersebut.

Alokasi untuk belanja modal biasanya didasarkan pada kebutuhan tiap satuan kerja. Hal ini berarti tidak semua satuan kerja melakukan pengadaan aset tetap. Hal berbeda terjadi pada belanja pemeliharaan. Belanja pemeliharaan adalah belanja yang bersifat rutin yang terdapat pada semua satuan kerja yang memiliki aset, sehingga penentuan besarnya anggaran belanja pemeliharaan tiap tahunnya bergantung pada banyaknya aset yang dimiliki oleh satuan kerja bersangkutan.

Temuan Kamensky (1984) dalam Abdullah dan Halim (2006) berargumen perlunya menghubungkan keputusan belanja modal dengan keputusan belanja operasional. Yang dilakukan oleh temuan Karo-karo (2006) menemukan bahwa tidak terdapat hubungan belanja modal dengan belanja operasional dan

pemeliharaan. Penelitian yang dilakukan Abdulla dan Halim (2006) menemukan bahwa belanja modal berasosiasi positif terhadap belanja operasional dan pemeliharaan.

Sedangkan, temuan yang dilakukan oleh Abdullah (2006) menyatakan bahwa belanja modal (2003) tidak mempunyai korelasi dengan belanja pemeliharaan (2004) untuk wilayah pulau Jawa, dan hubungan antara belanja modal (2003) dan belanja pemeliharaan (2004) mempunyai korelasi yang cukup kuat baik di pulau Jawa maupun wilayah luar pulau Jawa.

Selanjutnya, hasil analisis belanja modal (2003) dan belanja pemeliharaan (2004) menunjukkan bahwa di daerah pulau Jawa dan luar pulau Jawa tidak memiliki korelasi, begitu juga untuk total selisih belanja modal dan selisih belanja pemeliharaan tidak memiliki korelasi.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat ditarik hipotesis hubungan anatara belanja modal dan belanja pemeliharaan sebagai berikut:

H_0 : Belanja modal pada tahun sebelumnya (2017) berhubungan dengan belanja pemeliharaan pada tahun berikutnya (2018).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Jl. Negara Firdaus Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2018 – Januari 2019.

3.2 Desain Penelitian

Menurut Jadongan Sijabat **“Desain penelitian merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.”**¹¹

Menurut Arfan Ikhsan **“Desain penelitian mengungkapkan struktur masalah penelitian dan rencana penyelidikan yang digunakan untuk memperoleh bukti empiris tentang hubungan masalah-masalah.”**¹²

Dalam penelitian ini, desain penelitian yang akan digunakan adalah desain Kausal. Desain Kausal merupakan desain penelitian yang menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Sifat hubungannya yaitu hubungan yang terjadi apabila variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Penelitian ini akan membahas hubungan antara belanja modal

¹¹Jadongan Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, 2014, hal. 12.

¹²Arfan Ikhsan. et all., **Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen**, Cetakan Pertama: Citapustaka Media, Bandung, 2014, hal. 79.

tahun sebelumnya (2017) dan belanja pemeliharaan tahun berikutnya (2018) pada Pemerintah kabupaten Serdang Bedagai.

3.3 Populasi Penelitian

Menurut Arfan Ikhsan **“Populasi adalah keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan.”**¹³

Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Objek yang diteliti adalah data mengenai anggaran belanja modal tahun (2017) dan data anggaran belanja pemeliharaan untuk tahun berikutnya (2018).

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Jadongan Sijabat **“Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).”**¹⁴

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu melakukan studi literatur yang terkait baik berupa jurnal, buku, atau artikel lainnya. Studi literature ini dilakukan untuk menyusun beberapa teori dan pendapat yang berkembang dan sebagai dasar teori yang mendukung penelitian ini.

Tahap kedua dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperlukan untuk menguji hipotesis dalam penelitian yaitu data anggaran belanja modal dan anggaran belanja pemeliharaan. Data ini diperoleh dari laporan anggaran 2014 dan 2018.

3.5 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

¹³Ibid, hal. 105

¹⁴Jadongan Sijabat, **Op.Cit.**, hal. 82

Menurut Arfan Ikhsan“**Variabel Penelitian merupakan suatu sifat yang dapat memiliki berbagai macam nilai yang bervariasi**”.¹⁵

Menurut Arfan Ikhsan“**Defenisi Operasional merupakan suatu defenisi yang dinyatakan dalam bentuk istilah yang diuji secara spesifik atau dengan pengukuran kriteria**”.¹⁶

Dalam penelitian ini digunakan dua macam variabel penelitian, yaitu variabel terikat dan variabel bebas.

1. Variabel terikat (*dependent variables*) adalah jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen.
2. Variabel bebas (*independent variables*) adalah jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan belanja modal dan belanja pemeliharaan pada pemerintah kabupaten serdang bedagai. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen sebagai belanja modal dan belanja pemeliharaan sebagai variabel dependen.

3.5.1 Variabel Independen

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya untuk mempertahankan atau

¹⁵Arfan Ikhsan. et all., **Op.Cit.**,hal.66-67

¹⁶Arfan Ikhsan. et all., **Op.Cit.**,hal.70

menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:

1. Belanja Publik yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. misalnya, gedung dan bangunan, pembangunan jalan raya, pembelian alat transportasi.
2. Belanja Aparatur

Belanja aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak dapat langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat periode berjalan dan periode yang akan datang. misalnya, pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintah.

3.5.2 Variabel Dependen

Belanja pemeliharaan adalah kewajiban yang muncul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada agar tetap dalam kondisi yang normal tanpa memperhatikan besar atau kecil aset tersebut. Belanja pemeliharaan adalah belanja yang bersifat rutin yang terdapat pada semua satuan kerja, atau pemerintah daerah yang memiliki aset, sehingga penentuan besarnya anggaran belanja pemeliharaan setiap tahunnya tergantung pada banyaknya aset yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja atau pemerintah daerah yang bersangkutan.

3.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan belanja modal dan belanja pemeliharaan. Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penulis menggunakan korelasi *Pearson Product Moment*, uji signifikansi korelasi dan koefisien determinasi. Menurut Arfan Ikhsan “**Analisis korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel, tujuan diadakannya analisis korelasi anatara lain**” :¹⁷

- a. Untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan (korelasi) antar variabel
- b. Bila sudah ada hubungan, untuk melihat besar kecilnya hubungan antar variabel
- c. Untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti (menyakinkan/signifikan) atau tidak berarti (tidak menyakinkan).

Korelasi Pearson (*Product Moment*)

Uji Pearson Product Moment adalah salah satu dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan 2 variabel yang berskala interval atau rasio, di mana dengan uji ini akan mengembalikan nilai koefisien korelasi yang nilainya berkisar antara -1, 0 dan 1. Nilai -1 artinya terdapat korelasi negatif yang sempurna, 0 artinya tidak ada korelasi dan nilai 1 berarti ada korelasi positif yang sempurna. Rentang dari koefisien korelasi yang berkisar antara -1, 0 dan 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila semakin mendekati nilai 1 atau -1 maka hubungan makin erat, sedangkan jika semakin mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. Berikut ini rumus korelasi *Product Moment* :

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

¹⁷Ibid, hal.181

Keterangan:

- r_{xy} : koefisien korelasi r pearson
 n : jumlah sampel/observasi
 x : variabel bebas/variabel pertama
 y : variabel terikat/variabel kedua.

**Tabel 2.1 Pedoman untuk Memberikan Interpretasi
 Terhadap Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
>0-0,25	Sangat Lemah
-0,5	Cukup
>0,5-0,75	Kuat
-0,99	Sangat Kuat

Sumber : (Sarwono, 2006)

Nilai koefisien korelasi r berkisar antara -1 sampai +1 yang kriteria pemanfaatannya sebagai berikut :

1. Jika nilai $r > 0$ artinya telah terjadi hubungan/korelasi positif, yaitu makin besar nilai variabel X (independen), makin besar pula nilai variabel Y (dependen), begitupun sebaliknya. Semakin dekat nilai koefisien korelasi ke +1 semakin kuat korelasi positifnya.
2. Jika nilai $r < 0$ artinya telah terjadi korelasi negatif, yaitu makin kecil nilai variabel X (independen), maka makin besar nilai variabel Y (dependen). Semakin dekat nilai koefisien korelasi ke -1 semakin kuat korelasi

negatifnya.

3. Jika nilai $r = 0$ artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen dan variabel dependen.
4. Jika nilai $r = 1$ atau $r = -1$ telah terjadi hubungan/korelasi positif atau negatif yang sempurna.

Uji Signifikansi Korelasi

Untuk menguji tingkat signifikansi hasil perhitungan koefisien korelasi, maka uji statistik yang digunakan adalah uji t. Dari hasil perhitungan uji t ini akan ditentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak.

Dalam penelitian ini, uji signifikansi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji t, dengan rumus :

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Uji t ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

1. Jika nilai t hitung $>$ t tabel, H_a diterima
2. Jika nilai t hitung $<$ t tabel, H_0 ditolak.

Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara

variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negative dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$Y' = a + bX$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X = Variabel independen

a = Konstanta (nilai Y apabila X = 0)

b = koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variansvariabel dependen dapat dijelaskan oleh varians atau perubahan variabel independen, atau dengan kata lain seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh belanja modal tahun sebelumnya terhadap belanja pemeliharaan tahun berikutnya.

rumusnya (Sarwono, 2006) sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = nilai koefisien determinasi

r = nilai koefisien korelasi